



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN
SUB UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI HANGGONO ACHMAD
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 72436

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 521.026.000**

1. Tanah Seluas 120 m² di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 106.714.000
2. Tanah Seluas 5334 m² di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. Tanah Seluas 122 m² di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m²/190 m² di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 169.312.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.440.700.000**

1. MOBIL, FORD EVEREST JEEP Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MINI BUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOBIL, NISSAN TEANA SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 535.700.000
5. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET 500 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 85.632.100****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	88.635.182
F. HARTA LAINNYA	Rp.	84.500.000
Sub Total	Rp.	2.220.493.282
III. HUTANG	Rp.	38.489.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.182.004.282

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.